

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos/Radar Semarang | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah Berita: BPK Jawa Tengah

Kalan BPK Provinsi Jateng : Ada Kelemahan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (1)

<http://analisapublik.com/2018/12/18/kalan-bpk-provinsi-jateng-ada-kelemahan-dalam-pembinaan-dan-pengawasan-pengelolaan-dana-desa/>

ANALISAPUBLIK.COM | Semarang – Dana Desa seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Berdasar pemeriksaan BPK, dari aspek pembinaan dan pengawasan, masih ditemukan kelemahan-kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Jateng.

Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo dalam acara tersebut, Senin 17/12/2018 mengatakan. Penyerahan 22 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2018. Hal tersebut menjelaskan terkait LHP Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan Semester I 2018 yang menjadi salah satu dari 22 LHP yang diserahkan dalam kesempatan tersebut.

Dalam acara yang dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng tersebut, Kalan BPK Provinsi Jateng menyerahkan LHP BPK kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili dari setiap pemerintah daerah yang menjadi entitas pemeriksaan. Penyerahan 22 LHP BPK yang digelar tersebut merupakan acara penyerahan LHP tahap kedua. Sebelumnya, pada Selasa (11/12) lalu, BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga telah menyerahkan 6 LHP untuk Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2018. Dengan demikian, selama Desember 2018, seluruhnya terdapat 28 LHP untuk Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang telah diserahkan BPK.

Adapun 28 LHP yang telah diserahkan tersebut terdiri dari 18 LHP BPK atas Pemeriksaaan Kinerja dan 10 LHP BPK atas PDTT, dengan rincian sebagai berikut. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana. Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sampai dengan Semester I tahun 2018 pada 8 entitas, yaitu. Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Suoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.

Sedangkan Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017 dan 2018 (Semester I) pada 4 entitas, yaitu. Kabupaten Blora, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Purbalingga.

Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 (Semester I) pada 4 entitas, yaitu: Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Karanganyar

Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Keuangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sampai dengan Semester I pada Kota Tegal. dan laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Manajemen Belanja Infrastruktur Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kabupaten Sragen.

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos/Radar Semarang | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah Berita: BPK Jawa Tengah

Kalan BPK Provinsi Jateng : Ada Kelemahan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (2)

<http://analisapublik.com/2018/12/18/kalan-bpk-provinsi-jateng-ada-kelemahan-dalam-pembinaan-dan-pengawasan-pengelolaan-dana-desa/>

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pasar Rakyat Tahun 2017 Sampai Dengan Semester I tahun 2018 pada 4 entitas, yaitu. Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Pekalongan. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Semester I pada 4 entitas Pemerintah Provinsi Jateng, Kabupaten Megelang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Klaten.

Dari hasil Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Semester I pada Kota Semarang, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Tahun Anggaran 2018 pada Kabupaten Banjarnegara.

Selain itu Heri Subowo juga menyampaikan, BPK memiliki perhatian besar pada pengelolaan dana desa di Jateng karena selain dana desa sangat berhubungan dengan kepentingan kemaslahatan masyarakat, anggaran dana desa di Jateng juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, anggaran dana desa di Jateng adalah Rp2,23 triliun. Tahun 2016, anggaran dana desa menjadi Rp5 triliun. Pada tahun 2017, anggaran dana desa di Jateng mencapai 6,38 triliun.

Dan pada tahun 2018, anggaran dana desa meningkat lagi menjadi Rp6,73 triliun. Jateng memiliki 7.809 desa atau 11,35% dari 68.827 desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau pengelolaan dana desa di Jateng ini baik, maka dampaknya tentu akan signifikan pada perbaikan pengelolaan dana desa di Indonesia, jelasnya.

Tak hanya itu, Heri Subowo juga menjelaskan, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan dana desa di Jateng difokuskan pada aspek pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dari aspek pembinaan antara lain ditemukan bahwa pemerintah belum merencanakan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan dana desa secara memadai. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan atas pengelolaan dana desa juga belum dilaksanakan secara optimal.

Sedangkan dari aspek pengawasan antara lain ditemukan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung pengawasan yang baik. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengelolaan dana desa oleh pemerintah juga kurang memadai.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi saat di konfirmasi menyampaikan bahwa. LHP BPK merupakan salah satu referensi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Jateng.

Menurut Rukma, Laporan Hasil pemeriksaan dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi. Untuk itu, apapun rekomendasi BPK agar segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti, ujarnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan Kinerja dan PDDT merupakan dua dari tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Selain Pemeriksaan Kinerja dan PDDT, dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. (novi)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH